MEKANISME PENJARINGAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018

OLEH:

ADIL FADLY

E052171026

PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

MEKANISME PENJARINGAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018

TESIS

Diajukan sebagai salh satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Ilmu Politik

Disusun dan diajukan oleh :

ADIL FADLY

E052171026

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

TESIS

MEKANISME PENJARINGAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018

Disusun dan diajukan oleh

ADIL FADLY

Nomor Pokok : E052171026

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **24 Agustus 2020**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Dr. Muhammad Saad MA.	**Dr. Gustiana A. Kambo, S. IP., M.Si.**
Ketua	Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Politik,	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
Dr. Ariana,S. IP., M.Si.	**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adil Fadly

Nomor Pokok Mahasiswa : E052171026

Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 November 2020

Yang Menyatakan,

Adil Fadly

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Mekanisme Penjaringan Partai Demokrat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018”, yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar master Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam penyelesaian tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan: Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. H. Armin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, sekaligus sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
3. Ibu Dr. Ariana, S. IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, sekaligus sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini

4. Bapak Dr. Muhammad Saad, M. Si. Selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini, serta atas ilmu yang diberikan selama masa studi pada jurusan ilmu politik Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan tesis, begitupun ilmu yang diberikan selama masa studi pada jurusan ilmu politik Program Magister Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Phil. Sukri. Ph.D. sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
7. Dosen pengajar Ilmu Politik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas ilmu yang telah berikan selama perkuliahan.
8. Kedua Orang Tuaku Najamuddin dan St. Rahmah serta kakakku Endang Sari, S. IP., M.Si. atas dukungan dan doanya yang tak henti-hentinya sehingga menjadi kekuatanku selama menyesuaikan tesis ini.
9. Sahabat dan keluarga tercinta Rumah Ide Group, Indonesia Development Engineering Consultant, Active Advertising,

Readtimes.id, Republik_Ide, dan Kopi Ide, NM atas supportnya saat proses penyelesaian studi ini

10. Sahabat dan Kelurga BTP Tercinta , Kak Nunu, Kak Wawa, Andries, Arman, Rosita dan Dea atas support dan doanya untuk menyelesaikan studi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan politea 2017 , Pak Sudirman, Andries, Arman, Rusdi, Wahyu, Alim, Ardi, Wisda, Soleha, Nadia, Rosita, Dea, Yasni, Kak Nunu, Kak Wawa, Kak Ruslan, Wiwid, Ka Cacci, Kak Desi, Kak Tanti, Kak Anreas, Kak ridwan, Kak Lukman, Bang Iping, Bang Aji Ansari atas dukungan dan doanya dalam menyelesaikan studi.
12. Sahabat terkasih Akbar Najamuddin yang telah meluangkan waktunya pada penelitian tesis ini
13. Staf Akademik, Pak Irman, Ibu Ira, Pak Sutami, Nadir, Serta Staf Perpustakaan Fisip atas suportnya dalam menyelesaikan administarsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu terim kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Makassar, Agustus 2020

Adil fadly

ABSTRAK

ADIL FADLY. *MEKANISME PENJARINGAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2018* (Dibimbing oleh Muhammad Saad dan Gustiana A. Kambo)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Mekanisme Penjaringan Partai Demokrat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 dan untuk menjawab mengapa terjadi disfungsi partai maka diuraikan dua rumusan masalah, yaitu mengetahui dan menganalisis mekanisme proses penjaringan calon walikota dan wakil walikota Makassar Partai Demokrat serta menjawab alasan mengapa partai Demokrat tidak mengusung kadernya sendiri pada pemilihan walikota Makassar Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Adapun dasar penelitian yaitu studi kasus. Studi kasus yang diangkat terkait dengan kegagalan Partai Demokrat mengusung kadernya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap memahami dan mengetahui objek dari tema penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjaringan bakal calon usungan partai Demokrat dilaksanakan secara bertahap yaitu: *pertama*, Pendaftaran bakal calon di DPC Partai Demokrat Makassar. *kedua,* Melakukan uji kelayakan dan kepatutan. *ketiga,* Penetapan pasangan calon oleh DPP partai Demokrat. Sementara faktor yang menyebabkan Partai Demokrat tidak mengusung calonnya pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 dikarenakan oleh tiga hal. Pertama, Potensi Elektabilitas Kader lemah, kader partai demokrat yang ikut dalam proses pencalonan walikota makassar tidak memiliki kekuatan elektoral yang kuat untuk memenangkan pemilihan. Kedua, Konflik Antar Kader Partai, konflik di internal partai demokrat kota makassar menyebabkan kader tidak solid untuk mendukung kadernya sendiri. Ketiga, Dominannya Pengambilan Keputusan Elit DPP yang menyebabkan proses kaderisasi di daerah tidak berjalan demokratis.

Kata kunci: Kaderisasi, Partai politik, Pilkada, Rekrutmen, Elektabilitas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN PUSAT BAHASA

ABSTRACT

ADIL FADLY. *Mechanism For Caderization Of Democratic Parties In The Election Of Mayor Of Makassar 2018* (Supervised by Muhammad Saad and Gustiana A. Kambo).

This study aims to explain and analyze mechanism for caderization of democratic parties in the election of mayor of makassar 2018 as well as to answer why party dysfunction occurs, then two problems were formulated, namely knowing and analyzing the mechanism for selecting candidates for mayor and deputy mayor of Makassar Democrats and answer the reason why the Democratic party did not bring its own cadres in the Makassar mayor election in 2018.

This research was conducted in the city of Makassar, using descriptive qualitative research methods, the basic research is case studies. The case study raised was related to the failure of the Democratic Party to bring its candidates to the election of the mayor and deputy mayor of Makassar in 2018. Data were obtained through in-depth interviews with informants who were considered to understand and know the object of the theme of this study.

The results showed that the selection mechanism for prospective stretchers of the Democratic Party was carried out in stages, namely: first, Registration of nominees in the Makassar Democratic Party Branch Leadership Board. second, Conduct due diligence and propriety. third, Determination of candidate pairs by the Democratic Central Board, then the factor that caused the Democratic Party not to carry its candidates in the Makassar Mayor Election in 2018 due to three things. First, the potential for electability of weak candidates, the prospective democratic party candidates who took part in the candidacy process for the Makassar mayor did not have strong electoral power to win the election. Secondly, Conflicts between Candidates in the Party, Conflict in the internal party of the Makassar Democrat Party causes the party management to not be solid to support their own candidates. Third, The dominance of Elite Decision Making Central leadership councils that cause the process of regeneration in the region is not running democratic.

Keywords: Caderization, political parties, local elections, recruitment, electability

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
BAB II 10
TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Pendekatan Kelembagaan Baru (New institusionalism) 10
2.2 Konsep Partai Politik 20
2.3 Institusionalisasi Partai Politik 21
2.3 Rekruitmen Politik 30
2.4 Rekrutimen Politik 30
2.4.1 Rekruitmen Sebagi Fungsi Kaderisasi Partai 31
2.4.2 Rekruitmen Sebagai Fungsi Seleksi Kandidat 34
2.4.3 Penelitian Sebelumnya Yang Relevan 40

2.4 Kerangka Pemikiran 44
BAB III 48
METODE PENELITIAN 48
3.1 Lokasi Penelitian 48
3.2 Dasar dan Tipe Penelitian 48
3.3 Jenis Data 50
3.3.1 Data Primer 50
3.3.2 Data Sekunder. 51
3.4 Teknik Pengumpulan Data 51
3.5 Teknik Analisis Data 52

BAB IV 55
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 55
4.1 Lokasi penelitian 55
4.2. Gambaran Umum Pemilihan Walikota Makassar 56
4.2.1 Kilas Balik Pemilihan Walikota Tahun 2013 56
4.2.2 Jumlah Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 58
4.2.3 Kekuatan Partai Politik Kota Makassar 60
4.2.4 Para Kontestan Pilwali Makassar 2018 62
4.2.5 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota Makassar 2018 64
4.3. Profil Partai Demokrat 68
4.3.1 Sejarah Partai Demokrat 68
4.3.2 Visi misi Partai Demokrat 69
4.3.3 Pedoman organisasi Partai Demokrat dalam rekruitmen kandidat calon walikota Makassar. 71
BAB V 80
HASIL DAN PEMBAHASAN 80

5.1 Mekanisme penjaringan Partai Demokrat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. 80

5.1.1 Pendaftaran bakal calon 81

5.1.2 Fit and proper tes 84

5.1.3 Penentuan oleh DPP 87

5.2 Faktor yang menyebabkan Partai Demokrat tidak mengusung kadernya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018. 90

5.2.1 Potensi Elektabilitas Kader 91

5.2.2 Konflik Antar Kader Partai 102

5.2.3 Dominannya Pengambilan Keputusan Elit DPP 113

BAB VI 118

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN 118

6.1 Kesimpulan 118

6.1.1 Mekanisme Penjaringan partai Demokrat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2018 118

6.1.2 Kegagalan Partai Demokrat dalam mengusung Kader Pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2018 120

6.2 Saran 122

DAFTAR PUSTAKA 125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar Tahun 2018…….57

Tabel 1.2 Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Walikota Partai Demokrat……88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Daftar Pemilih Kota Makassar tahun 2018…….....58

Gambar 1.2 Perolehan Kursi Partai DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019…….……..59

Gambar 1.3 Perolehan Kursi Pilkada Kota Makasar Tahun 2018 .65

Gambar 1.4 Hasil Calon Walikota Makassar…….... 97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan partai politik menjadi *conditio sine qua non* (setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat) bagi bekerjanya mekanisme demokrasi. Partai Politik sebagai pengorganisasian warga negara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan bertujuan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan negara serta mengisi posisi-posisi politik di semua tingkatan struktur lembaga pemerintahan.

Eksistensi partai politik dalam demokrasi tidak terlepas dari berbagai peran penting yang diembannya dalam mengonsolidasikan kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan peran dan fungsi-fungsinya. Diantaranya menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat; melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga

legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya; dan tentunya menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik.[1]

Membahas tentang fungsi partai politik terkait rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan. Partai politik dalam konteks pemilihan umum memiliki peran penting dalam sirkulasi elit tak terkecuali di daerah seperti yang telah diatur dalam undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No 10 Tahun 2016 di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah diusung oleh partai atau koalisi partai politik.

Partai politik pada tataran praktiknya hari ini belum optimal menjalankan fungsinya seperti yang diungkapkan oleh Safira Yuristianti,[2] dalam penelitiannya yang menemukan bahwa era Pemilukada secara langsung membuat partai politik cenderung mengesampingkan pertimbangan ideologis dan mengedepankan pertimbangan pragmatis seperti uang dan kekuasaan sebagai dasar pembentukan koalisi serta pengusungan calon kepala daerah. Sehingga dampaknya adalah munculnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah khususnya pada

[1] Harjanto, “Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik“, Jurnal Analisis CSIS Vol. 40 No. 2, 2011, Hal 138-159.

[2] Safira Yuristianti, FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI *2017(Studi Kasus: Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik)* hal. 11

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak beberapa periode lalu, semisal terdapat 3 dari 269 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti oleh pasangan calon tunggal bersaing dengan ‘kolom kosong’. Tiga daerah dengan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 tersebut yaitu Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur). Sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang kedua, 9 dari 101 daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong.

Sembilan daerah dengan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 adalah Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kota Sorong (Papua Barat), Kota Jayapura (Papua), Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah).

Pemilihan Kepala Daerah gelombang ketiga Tahun 2018 terdapat 16 pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Enam belas daerah tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone,

Kota Makassar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Membrano Tengah.

Terjadinya dominasi dukungan partai politik pada salah satu pasangan calon merugikan partai itu sendiri sebab Pemilihan Kepala Daerah bisa menjadi ajang bagi para partai politik untuk menguji ketahanan serta eksistensi politik mereka lewat kehadiran kader-kader berkualitas yang turun bertarung di pemilihan kepala daerah.

Makassar sebagai representasi dari Indonesia Timur pada Tahun 2018 pada praktiknya juga tak luput dari ketidakmampuan partai politik dalam mengusung kadernya pada bursa pemililihan dimana bertumpuknya dukungan partai pada salah satu calon di Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar yakni pasangan Munafri Arifudin dan Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) yang diusung oleh 10 partai[3] dari 12 partai yang menjadi kontestan pemilu. Hal ini tidak lantas menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar melawan kotak kosong dikarenakan pasangan petahana Ramdan Pomanto dan Indira Mulyasari yang awalnya tidak mendapatkan dukungan partai politik maju melalui jalur perseorangan.

Dukungan partai politik yang hampir semua menyatu pada pasangan Appi-Cicu bukan karena tidak adanya kader partai yang potensial dan layak dicalonkan pada pemilihan walikota dan wakil walikota

3 Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP

Makassar. Kader partai yang potensial salah satunya berasal dari Partai Demokrat dengan kekuatan 7 kursi sangat memungkinkan mencalonkan kadernya sendiri pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Apalagi Partai Demokrat memiliki kader yang potensial untuk didukung seperti sekretaris Dewan Pimpinan Darah (DPD) sulsel Partai Demokrat Syamsu Rizal.

Syamsu Rizal sebagai Sekretaris DPD Demokrat Sulsel telah lama menjadi kader partai dan turut membesarkan nama Partai Demokrat di Sulsel, bahkan pada saat Syamsu Rizal menjabat wakil walikota Makassar juga mampu meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat di Pemilihan Legislatif 2014 termasuk peningkatan suara Partai Demokrat di DPRD Sulsel . Adapun terkait keterpilihan dan elektabilitas Syamsu Rizal terhadap calon petahana Dani Pomanto tidak berbeda jauh, hal ini terbukti dengan survei elektabilitas berbagai lembaga survey seperti Konsultan Citra Indonesia LSI Group pimpinan Danny JA[4] menempatkan Syamsu Rizal di posisi kedua teratas setelah Dani Pomanto.

Syamsu Rizal sebagai kader partai yang telah berjasa dan mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri pada pertarungan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Syamsu Rizal yang terpilih menjadi wakil walikota pada pemilihan waliKota Makassar tahun 2013 berpasangan dengan Dany Pomanto, sangat mengharapkan dukungan Partai Demokrat untuk mengusungnya menjadi calon walikota

[4] https://Makassar.tribunnews.com/2017/02/11/danny-teratas-disusul-deng-ical-dan-cicu

Makassar Tahun 2018 melalui konvensi yang dilakukan Partai Demokrat sebagai salah satu syarat pencalonan.

Persyaratan yang ditentukan oleh Partai Demokrat untuk mengusung kandidat adalah memiliki integritas terhadap partai yang artinya mampu membesarkan nama partai. Kedua adalah kandidat yang memiliki tingkat keterpilihan tinggi setidaknya menurut penelitan berbagai Lembaga survey, dan selebihnya menyesuaikan dengan aturan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016, tentu jika merujuk pada fakta di atas, Syamsu Rizal adalah kader yang potensial untuk diusung oleh Partai Demokrat

Pemenuhan persyaratan yang diberikan oleh partai di atas, sebagai langkah awal Syamsu Rizal mengikuti pendaftaran yang dibuka Partai Demokrat di kantor DPC Demokrat Makassar, yaitu seleksi berkas Syamsu Rizal, dan mengikuti *fit and propert test* di DPD Demokrat sulsel. Selain itu juga melakukan lobi politik ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan beberapa partai untuk mecukupkan koalisi partai dalam mengusungnya dengan tujuan dapat mendeklarasikan namanya sebagai calon dari Partai Demokrat

Hingga batas akhir pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terjadi justru sebaliknya, Syamsul Rizal tidak mendaftarkan diri karena tidak mendapatkan dukungan dari partai politik termasuk Partai Demokrat,

disebabkan oleh DPP Partai Demokrat lebih memilih mendukung pasangan yang bukan kader yakni Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari yang maju lewat jalur independen. Dengan demikian Partai Demokrat tidak mengusung calon tapi mendukung kandidat yang maju lewat jalur perseorangan, dimana hal ini nampak semakin menegaskan bahwa disfungsi partai politik terjadi di Pemilihan Walikota Makassar. Partai Politik tak mampu menyiapkan kadernya dalam mengikuti seleksi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan pada proses kaderisasi partai

Berangkat dari penjelasan ketidakmampuan Syamsul Rizal yang notabene kader partai pada pencalonan Walikota Makassar periode 2018-2023 karena “tersandung” dukungan dan persetujuan partai, meskipun telah mengikuti tahapan mekanisme dan penjaringan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Makassar yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat, membuat penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang mekanisme pengusungan calon yang dilakukan Partai Demokrat dalam pengusungan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2018-2023 dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Mekanisme Penjaringan Partai Demokrat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penjaringan Partai Demokrat pada Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018
2. Mengapa Partai Demokrat tidak mengusung kadernya sendiri pada pemilihan walikota Makassar Tahun 2018

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme proses penjaringan calon walikota dan wakil walikota Makassar Partai Demokrat Tahun 2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Partai Demokrat tidak mengusung kadernya sendiri pada pemilihan walikota Makassar Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat akademik:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana Disfungsi partai politik terjadi pada Pemilihan WaliKota Makassar.

b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian tentang kepartaian.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat peran partai di pelaksanaan sebuah sistem Pemilu.

2) Manfaat praktis:

a. Penelitian ini diupayakan dapat digunakan sebagai acuan partai politik dalam menjalankan sebuah sistem politik.

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh partai politik maupun Calon Walikota untuk meningkatkan elektabilitasnya di kemudian hari.

c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat dalam memahami peran partai politik di pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif.

d. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan tinjauan konsep dan teori yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti, Adapun pendekatan dan teori yang digunakan yaitu: *pertama,* pendekatan Kelembagaan Baru, *kedua* Institusionalisasi Partai Politik, *Ketiga,* Rekrutmen Politik. Selanjutnya teori tersebut diharapkan dapat digunakan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

2.1 Pendekatan Kelembagaan Baru (New institusionalism)

Akar ilmu politik adalah pada studi-studi tentang lembaga, tentang kelembagaan negara, birokrasi, kebijakan publik, yang kesemuanya dilihat dalam kerangka kelembagaan. Tetapi pada periode pasca Perang Dunia II, disiplin ilmu politik, terutama di Amerika Serikat, telah mengkritik studi tentang lembaga-lemabaga tersebut dengan berkembangnya dua pendekatan yang lebih didasarkan pada asumsi individualistik : behavioralisme dan pilihan rasional. Kedua pendekatan ini mengasumsikan bahwa individu bertindak secara otonom sebagai individu, baik berdasarkan karakteristik sosio psikologis atau perhitungan rasional untung rugi oleh individu.

Dalam kedua teori, individu tidak dibatasi oleh baik lembaga formal maupun informal, tapi akan membuat pilihan mereka sendiri. Faktor individu dipandang lebih determinan dalam proses berjalannya lembaga-lembaga negara, serta pada keputusan-keputusan politik[5]. Hal ini merupakan titik tolak dari perkembangan pendekatan *"new institutisionalism*" atau pendekatan institusionalisme baru.

Berbeda dengan teori institusionalisme lama, *new institusionalism* lebih mencermati bukan hanya sekedar dampak institusi terhadap individu, akan tetapi juga bagaimana interaksi antara individu dengan institusi. Pendekatan Institusional baru lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu.

Hadirnya teori kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor

[5] Peters, B. G.2011. *Institutional Theory In Political Science: The New Institutionalism*. Bloomsbury
Publishing USA. Hal.25

beserta juga dengan segala pilihannya. Metode ini memberikan perhatian bahwa institusi mengakibatkan perilaku politik individu.

Rod Rhodes (1972) : Pendekatan institusional adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal. Ia memakai alat-alat ahli hukum dan sejarahwan untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis, dan ia membantu perkembangan model westmister tentang demokrasi representatif. Tahun 1980-an, perhatian terhadap lembaga formal dan non-formal pada sektor publik dan bagaimana peran penting struktur, mulai tumbuh kembali. Penjelasan kelembagaan digunakan dalam studi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperhatikan perilaku pada tingkat individu.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, disamping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris. Sebagai contoh : “institusionalisme lama” sistem presidensial secara signifikan berbeda degan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut ? Apakah perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja pemerintah?. Pertanyaan-pertanyaan kritis

tersebut, lebih jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan institusionalisme baru juga melihat bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.

Hall dan Taylor[6] membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism)*, institusionalisme pilihan rasional *(rational choice institutionalism)* dan institusionalisme sosiologis *(sociological institutionalism).* Dalam pandangan peters[7] Historical institutionalism dalam melakukan analisis berawal dari pemahaman yang menjelaskan bahwa pilihan terhadap sebuah kebijakan yang dibuat akan berpengaruh terhadap kebijakan selanjutnya dan pola tersebut akan berulang dan bertahan. Pendekatan ini menekankan pada 4 aspek penting yang membedakan dengan pendekatan lainnya, yakni: a) pendekatan ini berupaya untuk mengkonseptualisasi hubungan antara institusi dengan perilaku individu secara luas, b) pendekatan ini menekankan pada hubungan kekuasaan asimetris dengan operasi dan pengembangan institusi, c) pendekatan ini berupaya memiliki 5 pandangan pengembangan institusi yang menekankan pada pola ketergantungan (path dependence) dan hasil yang tidak terencana

[6] Hall, P. A., & Taylor, R. C. 1996. *Political Science and The Three New Institutionalisms*. Political Studies, 44(5), 936-957. Hal.9.
[7] Peters, B. G.2011. *Institutional Theory In Political Science: The New Institutionalism*. Bloomsbury
Publishing USA. Hal.19-20

(unintended consequences), dan d) pendekatan ini secara khusus memperhatikan perpaduan analisis institutional dengan sumbangan faktor-faktor lain yang bisa memberikan manfaat secara politik. Aspek-aspek ini membuat pendekatan ini menjadi lebih lengkap dalam melakukan analisis terhadap institusi dibandingkan dengan pendekatan lainnya.

Institusionalisme historis, menurut Hall dan Taylor[8]. Merupakan pendekatan yang eclectic yang mempertimbangkan faktor gagasan, perilaku individu, maupun pengaruh struktur di dalam interaksi politik yang melibatkan institusi. Di dalam studi politik, pada umumnya faktor-faktor tersebut dipelajari dengan pendekatan yang berbeda-beda. Faktor gagasan umumnya dipelajari dengan pendekatan normatif atau dekonstruktif. Faktor perilaku individu umumnya dipelajari dengan pendekatan behavioral (positivisme) atau pilihan rasional. Sedangkan faktor struktur pada umumnya dipelajari dengan pendekatan Marxisme, teori elite, atau realisme. Para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis berusaha untuk berpikir terbuka terhadap kemungkinan berlakunya berbagai faktor tersebut dan tidak membatasi analisisnya hanya pada faktor tertentu saja.

Mereka menekankan bahwa studi ilmu politik seharusnya lebih difokuskan pada sejarah mengenai apa yang terjadi, apa yang

[8] Hall, P. A., & Taylor, R. C. 1996. *Political Science and The Three New Institutionalisms*. Political Studies, 44(5), 936-957. Hal.7

dipikirkan dan apa yang dicitrakan; bukannya berpegang terlalu ketat pada kerangka teorietis. Inilah yang membuat mereka disebut sebagai institusionalisme "historis" karena bagi mereka "history matters". Perubahan yang terjadi dalam suatu proses institusionalisasi seperti pembuatan kebijakan, pola proses dan hasilnya bisa berbeda-beda setiap kasus, atau disebut juga path dependent. Oleh karena itu, analisis kontekstual historis terhadap suatu proses institusionalisasi dan dampaknya perlu dilakukan untuk dapat benar-benar memahami suatu peristiwa, perilaku atau perubahan politik.

Institusionalisme pilihan rasional berawal dari studi tentang perilaku kongres di Amerika, dimana terdapat perbedaan yang beragam dan tajam terhadap preferensi dan karakteristik legislator mengenai kebijakan. Tetapi meski terjadi perbedaan yang tajam, kongres masih menunjukkan situasi yang cukup stabil. Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana institusi dengan perbedaan yang tajam masih dapat berjalan dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah adanya transaksi atau tawar menawar di antara para legislator dalam perumusan atau kesepakatan terhadap kebijakan tersebut.

Terdapat proses-proses politik berdasarkan pertimbangan untung rugi untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama[9]. Institusionalisme pilihan rasional melihat proses institusionalisasi dan relasi antar institusi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan

[9] *Ibid,* Hal.9.

persoalan bersama melalui pertimbangan-pertimbangan rasional dan untung rugi. Dalam pandangan institusionalisme pilihan rasional-seperti halnya teori pilihan rasional-manusia secara individual-yang juga merupakan representasi dan sebuah institusi dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional, didasari oleh perhitungan ekonomis, untung rugi, memaksimalkan keuntungan dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Asumsi mendasar dari institusionalisme pilihan rasional adalah bahwa individu adalah aktor sentral dalam proses politik, dan bahwa orang-orang bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Salah satu mencapai tujuan tersebut secara efektif adalah melalui tindakan institusional, dan perilaku mereka juga dibentuk oleh lembaga.[10]

Tindakan individu mempengaruhi lembaga, tetapi juga diatur oleh aturan-aturan dalam lembaga. Karena itu, tindakan atau keputusan lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan individu. Institusionalisme pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan-baik formal maupun informal-yang disepakati bersama. Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah dimana aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan (biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi

[10] Peters, B. G. 2011. *Institutional Theory in Political Science: the new institutionalism*. Bloomsbury
Publishing USA. Hal.45

dan dengan demikian melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa memastikan hasil dari struktur yang terbentuk[11].

Kelompok teori yang ketiga, yaitu institusionalisme sosiologis, menekankan studi institusi politik pada aspek gagasan, norma, budaya dan identitas. Menurut Hall dan Taylor[12] para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme sosiologis berpandangan bahwa studi politik harus mencakup tidak hanya aturan-aturan formal, aspek kognitif, dan kerangka moral, namun juga kerangka pedoman bagi tindakan manusia. Dalam perspektif ini, terdapat tumpang tindih pengertian antara institusi dengan budaya. Kajian institusi yang sering dipandang berbeda karena berdasarkan struktur dan organisasi, dibandingkan dengan kajian budaya yang berdasarkan pemahaman tentang nilai-nilai, sikap dan perilaku bersama; dalam perspektif institusionalisme sosiologis ini sama dengan budaya.

Budaya sendiri dipandang sebagai institusi. Di sinilah letak relevansi nomenklatur ‘sosiologi’ yang dilekatkan pada institusionalisme dalam perspektif ini, karena adanya penekanan dalam perspektif ini

[11] Clarke, P. A., & Foweraker, J. 2001. *Encyclopedia Of Demokratic Thought.* Taylor & Francis. Hal 572.
[12] Ibid hal 13

untuk mempelajari dimensi kognitif dari institusi. Institusi dipelajari dari pola perilaku, simbol-simbol, norma yang memberi pedoman bagi perilaku, dan identitas. Model perspektif ini memiliki kemiripan dengan salah satu kecenderungan studi dalam sosiologi, yaitu konstruktivisme sosial (social constructivism).

Institusionalisme sosiologis memandang bahwa institusi mempengaruhi individu, termasuk dalam hal preferensi dan identitasnya[13] Berlawanan dengan teori pilihan rasional yang mengatakan bahwa perilaku politik manusia didorong oleh kepentingan obyektif (interest-driven), kalangan penganut teori institusionalisme sosiologis cenderung berpandangan bahwa justru institusi yang membentuk preferensi dan identitas individu. Hal ini karena di dalam praktiknya tidak semua institusi dan organisasi dibentuk untuk memaksimalkan kepentingan obyektif atau material. Banyak di antaranya dibentuk berdasarkan budaya atau nilai-nilai bersama. Dalam kaitannya dengan identitas, menurut teori ini, umumnya institusi dibentuk bersifat isomorfis, yaitu berdasarkan kesamaan identitas, preferensi kebijakan atau posisi di dalam struktur. Institusi membentuk preferensi dan identitas karena individu ingin berperilaku sesuai dengan lingkungan sosialnya (the logic of social appropriateness), bukan hanya karena perhitungan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi atau kekuasaan.

[13] Ibid hal 14

2.2 Institusionalisasi Partai Politik

Pelembagaan partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang penting untuk ditelaah adalah perubahan sistemiknya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini pelembagaan partai politik dipahami sebagai perubahan tatanan dalam memperkuat partai sebagai lembaga demokrasi yang tidak tergantikan untuk mengusung dan mendorong pencalonan seseorang menduduki jabatan publik sebagai kepala daerah yang ideal. Artinya, adanya perubahan tatanan tersebut perlu dipastikan bahwa dengan pelembagaan partai politik kita dapat dapat melahirkan kader – kader politik yang kompeten untuk diikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah.

Secara umum, sistem demokrasi yang ditopang oleh partai politik yang terlembagakan dengan baik, tentu akan berkorelasi positif dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh demokrasi. Karena itu, dalam proses pengembangan kelembagaan kepartaian sejatinya dapat berjalan beriringan dengan kemunculan kader-kader terbaik partai. Dengan kata lain, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap proses politik, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Dapat dipastikan, partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara segala proses pemerintahan dengan aktifitas masyarakat (Jimly. 1996). Singkatnya, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya.

Partai politik merupakan pilar dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organiasasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.[14]

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.[15] Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang - orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orentasinya, dapat dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.[16]

Secara umum defenisi partai politik dapat dikatakan bahwa suatu kelompok terorganisir yang angota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai - nilai dan cita - cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programya.[17]

---

[14] Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996, hlm. xi
[15] Budiarjo Miriam, "*Dasar-Dasar Ilmu politik*" Gramedia Pustaka Utama (Jakarta : 2008) hal 397.
[16] Ibid., 403
[17] Ibid., 404

Menurut, Edmund Burke, partai politik adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka berdasarkan pada prinsip - prinsip tertentu yang mereka semua sepakati.[18] Adapun Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon - calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan - tindakan pemerintah.[19]

Demi mengisi suatu jabatan politik, maupun jabatan administratif tidak lepas dari adanya peranan partai politik yang dianggap mampu menyediakan personel - personel yang dibutuhkan dalam suatu jabatan politik. Dengan demikian, partai politik jelas merupakan sarana yang paling penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut sebagian besar pemegang jabatan politik.[20]

Institusionalisasi Partai Politik menurut Huntington, institusionalisasi atau pelembagaan adalah proses dimana organisasi dan tata cara memperoleh nilai yang baku dan stabil[21]. Dengan kata

[18]EdmundBurke. Richard S, Katz dan William Crotty, Handbook Partai Politik. Bandung : Nusa Media, 2014 hlm.4

[19]Mark N. Hagopian.Syamsuddin haris, d.k.k *Panduaan Rekruitmen dan Kaderisasi Partai politik Ideal*. Jakarta : Direktorat Jendral dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Pusat Penelitiaan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2POLITIK LIPI), 2016, hlm 3

[20]Sahid, *Memahami Sosiologi, h.138*

[21]Samuel P."Huntington, "*Tertib Politik Pada Masyarakat YangSedangBerubah*" RajawaliPress (Jakarta : 2004,) hal16.

lain, institusionalisasi partai politik adalah pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku maupun dalam sikap atau budaya[22].

Institusionalisasi menurut Huntington, terkait dengan kemampuan organisasi partai dalam beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapi. Kemampuan adaptasi ini diukur dengan umur organisasi partai, frekuensi pergantian kepemimpinan, dan jumlah perubahan fungsional dalam organisasi partai. Jika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik dapat dikatakan terlembagakan dengan baik.

Mainwaring dan Scully (1995) membagi pelembagaan kepartaiaan menjadi empat dimensi. *Pertama,* sistem yang lebih terlembaga mewujudkan stabilitas yang cukup besar dalam pola persaingan partai. Ini adalah dimensi pelembagaan yang paling mudah untuk diukur, dan mungkin paling penting karena pelembagaan secara konseptual terkait erat dengan stabilitas.

Kedua, dalam sistem yang lebih melembaga, partai memiliki akar yang kuat di masyarakat dan sebagian besar pemilih, sebaliknya, memiliki keterikatan yang kuat kepada partai. Kebanyakan pemilih

[22]Ramlan Surbakti, "*Perkembangan Partai Politik Indonesia*" dalam Andy Ramses M dan La Bakry "*Politik dan Pemerintahan Indonesia*" MIPI, (Jakarta : 2009,) hal 143.

mengidentifikasikan diri dengan partai yang hampir setiap kali memilih partai itu, dan beberapa asosiasi kepentingan terkait erat dengan partai. Akar partai yang kuat dalam masyarakat membantu memberikan keteraturan dalam kompetisi pemilu yang dibutuhkan dalam pelembagaan.

Akar partai dalam masyarakat dan stabilitas kompetisi antarpartai, meskipun secara analitis dapat dipisahkan, saling terkait karena akar partai yang kuat dalam masyarakat menstabilkan kompetisi elektoral jika sebagiaan besar warga mendukung partai yang sama dari satu pemilu kepemilu berikutnya, jumlah pemilih mengambang menjadi sedikit, maka lebih kecil kemungkinan terjadi pergeseran pemilihan besar-besaran yang tercermin dalam volalitas yang tinggi. Sebaliknya, di mana partai memiliki akar yang lemah dalam masyarakat, lebih banyak pemilih cendrung beralih kesetiaanya dalam pemilu dari satu pemilu kepemilu berikutnya, sehingga menimbulkan potensi lebih besar bagi terjadinya volatilitas pemilihan yang tinggi.

Ketiga, dalam sistem yang lebih melembaga, aktor politik menyesuaikan legitimasi dengan partai. Mereka melihat partai sebagai bagian penting dari politik demokratisasi bahkan jika mereka kritis terhadap partai tentu dan menunjukan skeptisisme tentang partai secara umum. Legitimasi membantu menstabilkan sistem partai dan karenanya merupakan dimensi sikap yang bermakna dari pelembagaan.

Keempat, dalam sistem yang lebih melembaga, organisasi partai tidak tunduk kepada kepentingan dari segelintir pemimpin yang ambisius; mereka memperoleh status independen dan nilai mereka sendiri. Pelembagaan partai politik terbatas asalkan partai menjadi instrumen pribadi seorang pemimpin. Ketika partai yang sukses pemilu menjadi kendaraan personalistik, pelembagaan tingkat sistem rendah pada keempat dimensi ini. Organisasi yang solid mencerminkan dan memperkuat penetrasi partai dalam masyarakat.[23]

Pelembagaan partai politik melibatkan dua aspek penting, yaitu *value infusion* dan *behavioral routinization*. Yang pertama merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari mengejar tujuan-tujuan atau kepentingan individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik, dari sini maka partai politik akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya partai politik (*party rootedness*).

Sementara itu *behavioral routinization* terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada prediktabilitas dan regularitas perilaku dan

[23] Ibid, hlm.340-341

ekspektasi - ekspektasi dari para anggota, pengurus partai politik, maupun masyarakat luas lainnya.[24]

Vicky Randall dan Lars Svasand.25 Melihat institusionalisasi partai politik ke dalam aspek internal - eksternal dan aspek struktural-kultural, yang meliputi 1) derajat kesisteman, 2) derajat identitas nilai, 3) derajat otonomi dan 4) derajat citra publik.

Derajat kesisteman partai politik merupakan proses dimana partai politik melaksanakan fungsifungsinya sesuai dengan sistem yang dibangun dalam partai, bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi partai sesuai dengan aturan ataupun AD/ART partai politik dan aturan-aturan yang disepakati bersama dalam partai. Dalam rekrutmen politik, derajat kesisteman ini dilihat dari bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik sesuai dengan persyaratan, prosedur dan proses yang diatur dalam kebijakan partai.

Identitas nilai adalah ciri khas yang membedakan suatu partai politik dengan partai yang lain, yang meliputi ideologi dan platform partai, sehingga biasa dipolakan basis sosial dan identifikasi konstituennya. Otonomi keputusan merupakan kemandirian partai

[24] Nico harjanto." *Politik kekerabatan dan institusionalisasi partai politik Indonesia*", halaman.143

[25] Vicky Randall dan Lars Svasand, *dalam Party Politics Journal*,Vol. 8 Januari No. 1 tahun 2002, seperti dikutip Ramlan Surbakti, dalam Andy Ramses dan La Bakry, hal.143

politik dalam pembuatan keputusan dalam hubungannya dengan aktor-aktor di luar partai politik, baik dengan pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Citra publik merupakan pengetahuan publik tentang partai politik, yang terkait dengan gambaran dan penilaian publik tentang partai politik.

Identitas nilai dan citra publik dalam proses rekrutmen tercermin dalam kandidat yang diusung oleh partai politik. Menurut Mainwaring.[26] Hubungan antara partai dan kandidat merupakan elemen kunci dalam melihat institusionalisasi. Pemilu yang ditentukan oleh popularitas individu akan mempengaruhi kekuatan dan instusionalisasi partai politiknya. Lebih lanjut Mainwaring menyatakan bahwa jika politik didasarkan individu dan karismanya, partai tidak perlu mengakar dalam masyarakat. Jika kandidat lebih penting secara signifikan dari partai, maka partai politik sebagai organisasi gagal dalam mendapatkan legitimasi dari pemilih.[27] Identitas partai tidak didasarkan pada ideology atau program partai, namun lebih didasarkan pada tokoh yang ada pada masing-masing partai. Partai lebih memanfaatkan ketokohan untuk memperoleh dukungan massa.

[26] Michael Buehler dan Paige Tan, dalam tesis, Titin purwaningsih, *politik Kekerabatan Dalam politik Lokal Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi "Studi Tentang Rekruitmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009*" (Universitas Indonesia, 2014) hal. 33

[27] Ibid. hal. 34

Selznick membedakan antara organisasi yang terinstitusionalisasi dan yang tidak terinstitusionalisasi. Dalam organisasi yang tidak terinstitusionalisasi, anggota organisasi hanya berusaha untuk memperbesar pencapaian tujuan-tujuan mereka, sementara dalam organisasi yang terinstitusionalisasi ditandai dengan kepedulian dan komitmen untuk mempertahankan kelangsungan organisasi.[28]

Dominasi pemimpin personal tidak terlepas dari lemahnya akar partai[29], sehingga tokoh-tokoh populer yang ada di partai dijadikan ujung tombak dalam memperoleh dukungan. Dominasi pemimpin personal ini berimplikasi kepada terbatasnya citra publik mengenai partai yang bersangkutan. Pengetahuan publik mengenai partai tidak mendalam, namun hanya sebatas pada mengenal figur yang ada dalam partai.

Institusionalisme merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang organisasi berjalan secara formal dengan melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan sistem dan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam konteks institusionalisme partai politik itu dapat dilihat sejauh mana partai politik menjalankan keputusan-keputusan partai berdasarkan aturan atau mekanisme yang ada dalam partai politik tersebut.

[28] Ibid. 34
[29] Ibid. 35

2.3 Rekruitmen Politik

Zarkasih Nur, mengatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka digunakan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tertentu.[30]

Sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Partai politik sebagai institusi utama dalam demokrasi harus terinstitusionalisasi dengan baik, sehingga terjadi rotasi dan mobilitas politik. Apabila partai politik tidak terlembagakan dengan baik maka memunculkan diktatorisme maupun oligarki politik didalam partai politik, yang menyebabkan stagnasi dalam pembangunan demokratisasi.

Fungsi rekrutmen politik terbagi atas dua fungsi utama yaitu fungsi rekruitmen anggota partai dan fungsi rekruitmen sebagai prosese selaksi kandidat. Fungsi rekrutmen sebagai pelaksaan dari proses kaderisasi partai itu sendiri untuk mengajak orang orang

[30]Zarkasih Nur, *Partai Politik.*Budiarjo Miriam, "*Dasar-Dasar Ilmu politik*" Gramedia Pustaka Utama (Jakarta : 2008) h.404

menjadi anggota partai sedangkan fungsi rekruitmen sebagai seleksi kandidat merupakan langkah partai politik untuk mengikutsertakan kader kadernya atau anggotanya dalam pemilihan jabatan jabatan public biasanya dengan melewati proses pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

2.3.1 Rekruitmen Sebagi Fungsi Kaderisasi Partai

Dalam definisinya menurut kamus ilmiah popular, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet dari suatu partai atau organisasi (Partanto dan Bahri, 1994: 293-294). Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan dari kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Menurut Tead (dalam Kartono, 1994: 51), kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin penganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk mengerak[31]

[31] Insan Harapan Harahap KADERISASI PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN NASIONAL jurnal politik LIPI. hLm 2

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi - fungsi sistem negara itu melalui lembaga - lembaga politik yang ada. Dalam hal ini, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang - orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan sesuai atau tidak. Ini semua sangat tergantung pada pola - pola atau mekanisme rekrutmen dalam melakukan Pendidikan politik yang nerkesinambungan.

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya namun rekrutmen lebih dikenal dengan bahasa politik seperti yang dikatakan Meriam Budiarjo yaitu proses proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.[32]

Rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Bila melihat pengertian yang di kemukakan Ramlan

[32] Budiarjo Miriam, "*Dasar-Dasar Ilmu politik*" Gramedia Pustaka Utama (Jakarta : 2008) h.408

Surbakti, ternyata unsur partai politik di pandang sebagai lembaga politik penting yang melaksanakan rekrutmen politik.

Berangkat dari penjelasan diatas terkait peran organisasi partai politik sebagai organisasi yang sangat berperan dalam mencetak anggota dan kader partai politik yang berrkualitas untuk diikutkan dalam proses pemilihan umum untuk menempatkan di jabatan jabatan public. Sehingga perlu suatu proses Pendidikan politik baik yang bersifat formal maupun non formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter kepemimpinan.

Sehingga partai tentunya diharapkan mampu melakukan dan mengembangkan system rekruitmen, seleksi dan kaderisasi keanggotaan lewat Pendidikan politik. Pendidikan politik yang dimaksudkan adalah adanya transfer pengetahuan politik, yang tidak hanya terkait dengan kepentingan partai tersebut namun juga terkait dengan bangsa dan negara. Fungsi perekrutan membicarakan hal-hal seperti siapa yang memenuhi syarat sebagai anggota partai

Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia bermunculan calon-calon yang berasal dari luar partai dan mereka dicalonkan oleh partai politik dengan mengabaikan mekanisme seleksi yang sudah mereka buat. Hadirnya kandidat instan juga menunjukkan lemahnya proses kaderisasi di internal partai,

sehingga partai politik tidak mampu melahirkan kader-kader yang mempunyai kualitas, inegritas, kapabilitas, dan elektabilitas yang tinggi, yang menjadi faktor penting untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhani mengatakan saat Pemilihan Kepala Daerah berlangsung, sikap partai menjadi pragmatis, secara realistis berhitung antara menang atau kalah. Pendekatannya selalu pada, pasangan calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan memungkinkan untuk menang.[33]

Apa yang dikatakan Fadli Ramadhani pada Partai Demokrat kota Makassar tidak sepenunya terjadi dimana Partai Demokrat telah banyak mencetak kader-kader yang berkualitas khusunya di kota Makassar seperti wakil walikota Makassar Syamsul Rizal.

2.3.2 Rekruitmen Sebagai Fungsi Seleksi Kandidat

Seleksi kandidat kepala derah merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan kepala daerah serentak saat ini, pengambilan keputusan di internal partai politik sangat menentukan siapa kandidat yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Pemilihan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah sering kali menjadi bagian yang tidak teramati oleh para pemilih, masyarakat seringkali hanya

[33] (https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/asal-menang-dalam-pilkada-2017).

mengetahui hasil akhir dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang terjadi di internal partai, padahal model pemilihan

Syamsuddin haris, d.k.k[34] Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Lebih singkatnya bahwa rekrutmen politik adalah proses kandisasi. Sejumlah teori menyebut bahwa seleksi kandidat merupakan tahap kunci dan tahap yang menentukan. Karena dari proses rekrutmen itulah akan dihasilkan orang - orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa yang akan memerintah.

Tahap rekrutmen menurut Pippa Noris[35] bahwa pada proses rekrutmen biasanya meliputi tiga tahap yaitu tahap sertifikasi, nominasi, dan tahap pemilihan. Tahap sertifikasi merupakan tahap awal atau pendefinisian, yang antara lain mencakup penentuan kriteria yang dikehendaki, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma sosial. Sementara tahap nominasi berkaitan dengan ketersediaan (kader-kader partai) yang memenuhi syarat dan posisi yang akan diisi. Tahap selanjutnya berkaitan dengan

[34]Syamsuddin haris, d.k.k *.Panduaan Rekruitmen dan Kaderisasi Partai politik Ideal.* Jakarta : Direktorat Jendral dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Pusat Penelitiaan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2POLITIK LIPI), 2016, halaman. 9
[35]Ibid , hlm 10-11

proses pemilihan, yang umumnya berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan untuk memilih, dan bagaimana cara menentukan siapa yang menang.

Pentingnya fungsi rekrutmen dalam pemilihan umum juga dikemukakan oleh Katz dan Crotty (2014: 123 - 198) mengemukakan bahwa partai politik memiliki tiga fungsi yang terkait dengan pilihan rasional dalam pemilihan umum, antara lain partai politik sebagai mekanisme pilihan sosial, fungsi perekrutan, dan fungsi seleksi calon. Perekrutan merupakan salah satu fungsi klasik partai politik menyangkut peran mereka sebagai *gate keeper* dalam mencalonkan calon untuk jabatan di semua tingkat pemerintahan, rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih di tingkat lokal, regional dan nasional, dan daerah. Tetapi juga, mencakup pengisian berbagai penunjukan patronase untuk jabatan publik.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Athoff adalah proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu ,pertama sifat tertutup adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. Kedua sifat terbuka adalah sistem yang berdasarkan pada ujian - ujian terbuka.[36]

[36]Michael Rush, Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik,* terjemahan. Kartini Kartono, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h.247

Pandangan yang sama juga dikemukakan Almond[37] membagi dua prosedur dalam rekrutmen politik yaitu, prosedur tertutup dimana rekrutmen dilakukan oleh elit politik yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa calon - calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Ini dianggap tertutup karena penentuannya diserahkan kepada segelintir elit yang memiliki kuasa lebih. Sedangkan prosedur terbuka yaitu setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari hasil kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Analisis terhadap rekrutmen politik terdiri atas dua variabel, yaitu variabel hukum dan variabel partai. Secara umum rekrutmen politik terbagi atas dua variabel yaitu variabel eksternal dan variabel internal. Variabel eksternal meliputi sistem hukum, sistem politik dan sistem kepartaian yang mempengaruhi rekrutmen politik namun tidak secara langsung berkaitan dengan proses rekrutmen politik yang dilakukan. Variabel internal adalah variabel yang berkaitan langsung dengan proses dan mekanisme rekrutmen politik oleh partai politik.[38]

---

[37]*http://pajaksolusi.blogspot.co.id/2013/06/rekrutmen-politik-di-negara-indonesia.html*diakses pada tanggal 19 februari 2017.

[38]Peter"M." " Siavelis" dan" Scott"Morgenstern," Pathways To Power,Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America, "The"Pennsylvania"State"University"Press, "2008," halaman. 12-17

Sejarah politik menunjukkan paling tidak terdapat dua model rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di negara modern maupun di Negara berkembang. *Pertama* adalah yang disebut *descriptive style*, model ini merupakan model rekrutmen yang mengandalkan beberapa kriteria, antara lain menyangkut ketokohannya, menyangkut keuangannya, menyangkut kedekatannya dengan pengurus partai. Jadi yang berhubungan dengan ikatan primordial. *Kedua*, rekrutmen dengan model *oriented style*, yang merupakan model rekrutmen yang digambarkan dengan sesuatu yang ideal, yang mengandalkan kemampuan calon itu seperti loyalitas dan kemampuannya memimpin

Kualitas demokrasi pada partai politik dalam pemilihan calon kepala daerah dapat dianalisis dengan menggunakan klasifikasi model rekrutmen politik. Rekrutmen politik diklasifikasikan ke dalam empat model. Keempat model tersbut menurut Barbara Geddes (dalam Labolo, 2015) adalah sebagai berikut:

1. *Partisanship* yaitu rekrutmen politik ari partai politik yang dinilai, atas dasar loyalitas pada partai, dan berusaha mengumpulkan partisan, dalam model ini kurang memperlihatkan kompetensi.
2. *Meritockratic* yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti hal nya, teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli dan lain – lain.

3. *Compartmentalization.* Rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informal bagi posisi – posisi yang dipertimbangkan sebagai penting, bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan, pengangkatan – pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek, dan pengembangan pengikut yang loyal.
4. *Survival.* rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.

Menurut Syamsuddin Haris, d.k.k.[39] seleksi elit bagi partai politik di Indonesia mengenal tiga bentuk, yaitu, pertama, model institusional, bentuk paling mudah untuk menjelaskan bentuk *elite selection*, yaitu melalui rekayasa regulasi seperti *presidential threshold*.

Kedua adalah model kultural, di mana model ini menjadi bentuk paling khas dalam seleksi elit di Indonesia. Model kultural bermakna pada relasi patron-klien di dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi kepengurusan maupun proses kandidasi. Model seperti itu dapat menjadi penjelas lahirnya dinasti politik dan sejumlah

[39]Syamsuddin haris, d.k.k .*Panduaan Rekruitmen dan Kaderisasi Partai politik Ideal.* Jakarta : Direktorat Jendral dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Pusat Penelitiaan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2POLITIK LIPI), 2016, h. 15-16

kasus lainnya yang menunjukkan seleksi berciri kekeluargaan atau kedekatan.

Ketiga adalah model seleksi transaksi (*transactional selection*) yang banyak terjadi di dalam partai dengan potensi faksionalisasi yang tinggi. Terjadinya bentuk seleksi transaksional akan nampak ketika terdapat fraksi yang berkompetisi di dalam internal partai, atau akibat karena partai terlibat dalam konflik yang berlarut-larut. Transaksi seperti itu juga tampak kelihatan manakala partai mengalami perpecahan struktur organisasi. Transaksi dapat berupa dukungan politik atau finansial, tetapi juga atas dasar kedekatan.

2.4 Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama, KONFIGURASI AKTOR DAN INSTISUSI POLITIK DALAM PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017. Dibuat oleh Tito Handoko & Erman Muchtar**,** Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi aktor dalam penetapan calon Kepala Daerah dari PAN tergambar bahwa aktor daerah (lokal) tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena pada akhirnya penetapan calon menjadi domain DPP PAN. Asumsi ini diperkuat dengan diberikannya status kader kepada Irvan Herman yang jelas-jelas belum mengikuti kaderisasi (LKAD) pada Partai Amanat Nasional. Situasi kelembagaan yang timbul akibat penetapan calon Kepala Daerah oleh DPP PAN yakni lemahnya peran DPD atau struktur Partai di tingkat lokal dalam mengawal Pasangan Calon yang ditetapkan oleh DPP. Hal itu semakin menguatkan terjadinya politik

transaksional dalam penetapan calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional yang berdampak pada mundurnya demokratisasi di tubuh Partai karena semua keputusan strategis Partai ada di tangan DPP.

Kedua, PARTAI POLITIK DAN KADERISASI (Fenomena Pengusungan Kandidat Non Partai Politik Pada Pilkada DKI Jakarta 2017). Dibuat oleh Linda Pratiwi Mahasiswa FISIP UIN SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem kaderisasi Partai politik pada pilkada DKI Jakarta 2017 adalah pola kaderisasi untuk menyiapkan kader Partai dalam bursa pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di tubuh Partai politik pengusung tidak di prioritaskan. Kolisi Partai pengusung pasangan Agus-Silvy cenderung merekrut secara tertutup dengan mengusung Agus yang merupakan anak dari salah satu pendiri Partai pengusung utama dalam koalisi Partai pengusung Agus Silvy yakni Partai Demokrat. Lalu salah satu Partai pengusung utama dalam koalisi Partai pengusung Basuki-Djarot yakni PDI Perjuangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah dengan sistem terbuka dan hasil dari sistem tersebut terpilihlah Basuki-Djarot.

Koalisi Partai pengusung Anies-Sandi pun melakukan rekrutmen dengan sistem terbuka. Kepopuleran mereka membuat

Partai lebih mengutamakannya ketimbang kader Partai. Akibatnya kader-kader yang berkualitas semakin berkurang. Partai hanya disibukkan dengan bagaimana mendapat suara banyak agar memenangkan pilkada, serta memperkenalkan keberadaan aktor-aktor politik senior untuk pemilihan presiden mendatang.

Dari penelusuran literatur yang telah dilakukan, secara umum persamaan kajian ini dari studi terdahulu adalah dinamika rekrutmen Partai politik dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Relasi keduanya adalah bagaimana Partai politik menyiapkan kader yang berkualitas dan kapabel untuk diikutkan dalam pemilihan kepala daerah.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dari sudut perspektif yang berbeda di mana Partai Demokrat Makassar memiliki kader yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang layak untuk diusung dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar. Namun, Partai Demokrat lebih mengusung calon yang bukan kadernya dan yang lebih menarik adalah Partai Demokrat mengusung kandidat yang tidak melewati jalur parpol namun mendukung pasangan yang melalui jalur perseorangan.

Kebaruan yang ditawarkan dalam studi ini adalah: bagaimana Partai Demokrat yang memiliki kader yang berkualitas namun tidak mendapatkan dukungan terhadap Partainya pada pemilihan Walikota

Makassar. Serta mengapa Partai demokrat mengusung calon dan mendukung pasangan kandidat yang maju melalui jalur perseorangan.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, ialah kritik terhadap Partai politik yang memiliki kewenangan dalam membangun demokratisasi namun justru Partai politik terjebak dalam lingkaran oligarki dalam penentuan sirkulasi elite. Lebih lanjut Partai politik sebagai wadah mempersiapkan kader-kader yang potensial untuk disiapkan menempati jabatan publik lewat pemilihan umum. Namun justru gagal dalam mengusung kadernya dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam pengembangan khasanah kajian kepartaian.

2.5 Kerangka Pemikiran

Partai politik merupakan satu satunya organisasi politik yang memiliki peran penting dalam proses sirkulasi pergantian kepemimpinan kepala daerah. Peran tersebut sesuai dengan undang – undang No 16 tahun 2015 tentang pelakasanaan pemilihan kepala daerah. Dikatakan bahwa penyeleksian bakal calon kepala daerah Gubernur, Bupati dan atau Walikota harus dicalonkan oleh partai politik atau bgabungan partai politik pemilik kursi di dewan perwakilan rakyat daerah. Dengan demikaan sudah

seharusnya partai politik sebagai penentu utama dalam penyeleksian

calon kepala daerah harus benar – benar mampu membangun penguatan kelembagaan dengan menjalankan fungsi – fungsi kepartaian.

Salah satu fungsi utama parpol adalah melakukan kaderisasi dan rekruitmen politik. Kaderisasi politik sebagai proses Pendidikan politik menjadi keharusan untuk dijalankan oleh parpol dalam mempersiapkan kader dalam pemilihan kepala daerah. Sementara rekruitmen politik merupakan cara yang digunakan oleh parpol dalam menetapkan kandidat untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah. Apabila fungsi kaderisasi sudah dijankan dengan baik oleh suatu parpol maka seharusnya partai poltik dalam melakukan rekruitmen calon kepala daerah tidak lagi mengusung kandidat diluar kader partainya.

Pemilihan walikota Makassar tahun 2018 menjadi salah satu contoh ketidakmampuan partai politik dalam membangun institusional kelembagaan partai politik khususya yang terkait dengan proses kaderisasi. Hal itu dapat dilihat dengan menyatunya semua dukungan partai poltik pada pasangan Munarfi Arifuddin – Rahmatika Dewi. Kenyataan ini menjadi penilaiaan bagi semua parpol yang ada dikota Makassar gagal dalam mempersiapkan kader untuk diusulkan menjadi kandidat calon walikota dan wakil walikota Makassar.

Namun hal berbeda terjadi pada internal partai Demokrat, di kota Makassar dimana partai Demokrat kota Makassar justru mendukung kandidat petahana Moh. Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari yang maju

melalui jalur perseorangan. Keputusan yang diambil oleh partai Demokrat tentunya merugikan kader dan partainya sendiri. sebab partai Demokrat di kota Makassar memiliki beberapa kader yang kompeten dan siap untuk diusung menjadi kandidat calon walikota dan wakil walikota Makassar. diantaranya Syamsu Rizal dan Adi Rasyid Ali.

Berangkat dari penjelasan tersebut maka penting untuk melihat, bagaimana mekanisme rekruitmen partai Demokrat dalam mengusulkan kandidat pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, serta mengapa partai Demokrat tidak mendukung kadernya maju sebagai kandidat calon walikota dan wakil walikota Makassar?, pertanyaan ini yang kemudian menjadi titik tolak untuk melihat penyebab ketidakmampuan partai Demokrat pada pemilihan kepala daerah kota Makassar tahun 2018.

Skema Pemikiran
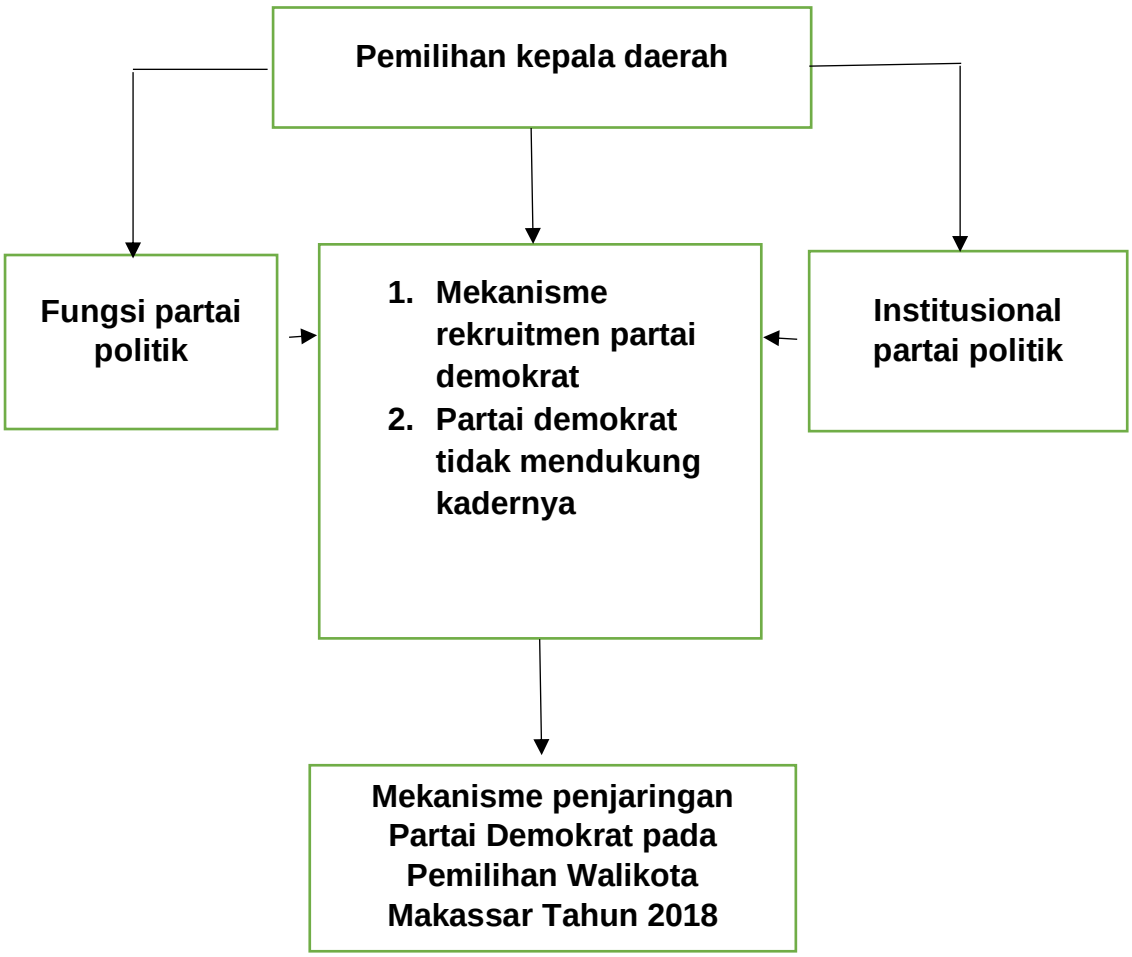
Gambar 1.1 Skema Pemikiran